

BAB V

DIALEKTIKA NILAI PENDIDIKAN ISLAM DAN GLOBALISASI

MENURUT ABDURRAHMAN WAHID

A. Nilai Manfaat Pendidikan Islam untuk Masyarakat dalam Konteks Globalisasi

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya¹. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu; axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S.Suriasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh².

Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial dan agama, sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan oleh setiap insan. Menurut Richard Bender : Suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian dengan pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian, atau yang menyumbangkan pada pemuasan yang demikian.

¹ Burhanuddin salam, *Logika Materil: Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), h. 168.

² Jujun S.Sumatriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 234.

Dengan demikian kehidupan yang bermanfaat ialah pencapaian dan sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah³.

Adanya pendidikan Islam sebagai salah satu wadah untuk mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam, sebagai landasan teologis, dan kebutuhan manusia akan percaya (*human of believe*) terhadap adanya Tuhan yang Mahakuasa, diakui ataupun tidak memberikan dampak logis yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan pemikiran pembaruan Islam dalam konteks pendidikan Islam dewasa ini sehingga pemahaman terhadap Islam sangat beragam, baik secara teoritis maupun aplikatif.⁴

Oleh karenanya, pendidikan Islam mempunyai peran, fungsi, dan tujuan membentuk manusia yang berevolusi atau berkembang menjadi insan kamil (manusia sempurna), yaitu manusia yang mempunyai kapasitas yang mampu menyeimbangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Hal tersebut menjadi salah satu acuan untuk menelaah atau meninjau peta intelektual Abdurrahman Wahid, khususnya dalam perkembangan dunia pendidikan Islam dewasa ini.⁵

Pendidikan Islam mengajarkan toleransi sesama umat manusia dan menghargai terhadap bentuk pemikiran dan sikap dalam koridor untuk membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Oleh karena itu,

³ Ali Abri, *Filsafat Umum Suatu Pengantar*, h. 33.

⁴ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 24.

⁵ *Ibid.*, h. 24.

perumusan tujuan pendidikan Islam tanpa memerhatikan prinsip-prinsip kebaikan budi pekerti (akhlak) merupakan suatu hal yang hampa.⁶ Di samping itu, pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak bisa lepas dari sistem nilai tersebut. Nilai ini merupakan sebuah tolak ukur proses perkembangan pendidikan Islam sebab pendidikan Islam berusaha membangun nilai-nilai yang indah (estetika) sehingga peserta didik mampu menghayati dan mengamalkan sistem nilai ajaran agama Islam dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁷

Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang menimbulkan dalam diri pribadi manusia melalui proses transformasi kependidikan. Proses kependidikan yang mentransformasikan (mengubah) nilai tersebut selalu berorientasi kepada kekuasaan Allah dan iradah-Nya (kehendak-Nya) yang menentukan keberhasilannya. Kemajuan peradaban manusia yang melingkupi kehidupannya, bagi manusia yang berkepribadian Islam, hasil proses kependidikan Islam akan tetap berada dalam lingkaran hubungan vertikal dengan Tuhannya dan hubungan horizontal dengan masyarakat.⁸

Ketika melihat realitas sosial yang majemuk, dituntut sebuah pemikiran yang cukup beragam pula, apalagi aspek pemikiran Abdurrahman Wahid dalam hal pendidikan Islam lebih banyak tercurah pada pondok pesantren sebagai salah satu

⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 66.

⁷ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 40.

⁸ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.

institusi tua yang berkembang pertama kali di bangsa ini, yang tentu saja membutuhkan pemikiran yang cukup beragam.⁹

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa dalam melakukan modernisasi, pesantren harus mampu melihat gejala sosial yang tumbuh di masyarakat, sehingga keberadaan pesantren tersebut dapat berperan sebagai pusat pengembangan masyarakat. upaya ke arah ini, menurut Abdurrahman Wahid dapat dilakukan dengan dua cara berikut:¹⁰

1. Jalur yang pertama adalah mengarahkan semua perubahan yang dilakukan pada tujuan mengintegrasikan pesantren sebagai sistem pendidikan ke dalam pola umum pendidikan nasional yang membangun dan kreatif. Hanya dengan tujuan pendidikan seperti ini dapat disimpulkan relevansi yang sesungguhnya bagi pengembangan pesantren itu sendiri.
2. Jalur yang kedua adalah meletakkan fungsi kemasyarakatan pesantren dalam konteks atau kerangka menumbuhkan lembaga-lembaga pemerintah (LNP, sebagai pengganti NGO yang menjadi kependekan dari Non-Governmental Orgaization) yang kuat dan matang di pedesaan sehingga mampu menjadi rekan yang sesungguhnya bagi pemerintah dalam kerja-kerja pembangunan.

Melihat gagasan dan pemikirannya yang demikian itu, tampak bahwa Abdurrahman Wahid menginginkan agar pesantren tidak hanya berperan sebagai

⁹ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 107.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), Cet. Ke-3, h. 176.

lembaga pendidikan keagamaan dalam arti yang selama ini berjalan, melainkan juga sebagai lembaga yang mampu memberikan sumbangan yang berarti serta membangun sistem nilai dan kerangka moral pada individu dan masyarakat. Dengan cara demikian, pesantren dapat menjadi lembaga yang mendidik manusia untuk bisa menjalani kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Abdurrahman Wahid demikian yakin, bahwa pesantren memiliki potensi yang cukup kuat untuk mewujudkan masyarakat madani.¹¹

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa tradisi pendidikan pesantren yang bernuansa masyarakat, merupakan modal yang amat berharga bagi pengembangan pendidikan yang lebih humanis. Menurutnya, tradisi pesantren telah terbukti sangat ampuh dalam memainkan perannya sebagai benteng kultural dan agama yang dapat diharapkan mampu menjadi penyelamat generasi muda muslim proses *brain washing* nilai-nilai keislaman yang terjadi dalam proses pendidikan umum. Dalam konteks ini terlihat dengan jelas, bahwa di dalam gagasan pembaruan sistem pendidikan pesantren yang dikemukakan Abdurrahman Wahid amat erat kaitannya dengan gagasan dan pemikiran humanismenya sebagaimana telah disebutkan di atas.¹²

Dari sudut teologi, terdapat dua komponen utama dalam pandangan Islam mengenai pengaturan masyarakat, yaitu watak kehidupan dan cara penggunaan kekuasaan. Dalam soal ini menurut Abdurrahman Wahid, Islam sebenarnya

¹¹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 352.

¹² *Ibid.*, h. 352.

berintikan 3 prinsip; *musâwah* (prinsip persamaan), *'adalah* (prinsip keadilan), dan *syûrâ* (prinsip musyawarah/demokrasi). Segala kegiatan mestilah bersendikan ketiga prinsip ini yang diramu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan yang dihadapi.¹³

Selanjutnya Abdurrahman Wahid menuturkan bahwa perkembangan masyarakat melalui pesantren tentu saja termasuk ke dalam kegiatan yang harus berdiri pada prinsip-prinsip tersebut. Perilaku orang-orang dalam kegiatan ini mesti pula tunduk pada ketiganya. Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa pola kepemimpinan kiai belum terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif, melainkan cenderung melaksanakan kehendaknya sendiri. Justru di sinilah tantangan yang sesungguhnya dalam melakukan kegiatan pengembangan masyarakat melalui pesantren, yaitu menyantuni dua tuntutan yang tampak bertolak belakang. Sementara itu, dalam masyarakat pesantren mesti ditegakkan prinsip persamaan antara kiai dengan unsur masyarakat yang lain, termasuk orang kecil. Jika diukur dengan prestasi menyantuni dua tuntutan ini, terpaksa harus dikatakan bahwa baru sedikit saja pesantren yang telah berhasil.¹⁴

Oleh karena itu, pengembangan masyarakat adalah upaya kolektif untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat, yaitu kesejahteraan kolektif yang tidak mengalahkan hak-hak individu dan perwujudan hak-hak individu dengan tidak merugikan masyarakat, sebagaimana yang terjadi

¹³ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 197.

¹⁴ *Ibid.*, h. 198.

di masyarakat kapitalis murni. Dalam kaitannya dengan peranan pesantren, lembaga ini harus membawakan konsep teologi Islam dalam wujud peranan untuk mengikuti sekaligus mengendalikan perubahan masyarakat pada batas-batas yang diperkenankan agama. Hal ini sebenarnya merupakan konseptualisasi dan aktualisasi dari tujuan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* dalam wujud upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat.¹⁵

Jadi, menurut Abdurrahman Wahid pendidikan Islam yang bernuansa masyarakat, merupakan modal yang amat berharga bagi pengembangan pendidikan yang lebih humanis. Menurutnya, tradisi pesantren telah terbukti sangat ampuh dalam memainkan perannya sebagai benteng kultural dan agama. Dengan bersandikan prinsip *musâwah* (prinsip persamaan), *‘adalah* (prinsip keadilan), dan *syûrâ* yang diramu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan yang dihadapi.

B. Strategi Pendidikan Islam Guna Menegakkan Konseptualisasi dan Aktualisasi Nilai Manfaat Pendidikan Islam untuk Masyarakat

Dalam perspektif pendidikan Islam, era globalisasi memang memiliki keterkaitan dengan pendidikan Islam. Karena globalisasi merupakan proses, dinamika atau perkembangan masyarakat yang sebelumnya memang belum terjadi, yang menciptakan pola-pola baru dalam struktur sosial masyarakat. Baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Sementara pendidikan Islam memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Adapun

¹⁵ *Ibid.*, h.199-200.

yang bertujuan jangka panjang seperti untuk pencapaian proses pemanusiaan kembali manusia (*humanisasi*)¹⁶ dan terlebih dalam Islam seperti yang diungkapkan oleh Athiya Al-Abrasy salah satu tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah untuk mempersiapkan kehidupan di dunia dan di akhirat.¹⁷

Atau dengan kata lain, pendidikan Islam bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menempuh kesempurnaan insani dalam menghadapi masyarakat yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah SWT. Sedangkan yang bertujuan pendek lebih menekankan pada aspek kebutuhan masyarakat ketika melihat kondisi atau perubahan masyarakat kekinian. Seperti penyiapan tenaga-tenaga profesional, penciptaan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan penyiapan sumber daya manusia sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang membutuhkan sebuah jawaban solutif.¹⁸

Adapun berbagai model pendidikan Islam yang berorientasi perspektif ke masa depan merupakan jawaban yang tepat guna. Namun ada pula model-model pendidikan yang terbukti tidak memuaskan tuntutan umat terlihat pada priksasinya sebagai berikut:

1. Model pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pikir bahwa nilai-nilai lama yang konservatif dan asketik yang harus dilestarikan dalam sosok pribadi

¹⁶ Paulo Freire, *The Politic of Education Culture, Power, and Liberalization*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. ix.

¹⁷ Omar Muhammad, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 416.

¹⁸ Imam Machali dan Musthofa (ed.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Poitik, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), h. 140.

muslim yang resistan terhadap pukulan gelombang zaman, adalah merupakan ciri utama pendidikan esensialistik. Orientasi demikian sudah tentu kurang dapat diandalkan oleh umat untuk menjawab tantangan zaman.

2. Jika pendidikan Islam berorientasi pada pola pikir bahwa nilai-nilai Islam yang mengandung potensi merubah nasib masa lampau ke masa kini yang dijadikan inti kurikulum pendidikan, maka model pendidikan Islam menjadi bercorak perenealistik di mana nilai-nilai yang terbukti tahan lama saja yang diinternalisasikan ke dalam pribadi anak didik. Sedang nilai-nilai yang potensial bagi semangat pembaharuan ditinggalkan.
3. Bila pendidikan Islam hanya lebih berorientasi pada personalisasi kebutuhan pendidikan dalam segala aspeknya, maka ia bercorak individualistik, di mana potensi *alloplastik* (bersifat merubah dan membangun) masyarakat dan alam sekitar kurang mengacu kepada kebutuhan sosial-kultural.
4. Jika pendidikan Islam berorientasi kepada masa depan sosio, masa depan tekno, dan masa depan bio, di mana ilmu dan teknologi menjadi pelaku perubahan dan perubahan kehidupan sosial, maka pendidikan Islam bercorak teknologis, di mana nilai-nilai samawi ditinggalkan diganti dengan nilai-nilai pragmatik-relativistik kultural.
5. Akan tetapi pendidikan Islam berorientasi kepada perkembangan masyarakat berdasarkan proses dialogis di mana manusia ditempatkan sebagai “*geiger-counter*”, pendeteksi sinar radio-aktif” elemen-elemen sosial yang berpotensi

kontroversial ganda yaitu membahayakan dan mensejahterakan, maka mekanisme aksi-reaksi dalam perkembangan manusia menjadi gersang dari nilai-nilai Illahi yang mendasari fitrahnya.¹⁹

Maka dari itu, Abdurrahman Wahid menyuguhkan kerangka strategis dalam kaitannya dengan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam, guna untuk menegakkan konseptualisasi dan aktualisasi nilai manfaat pendidikan Islam untuk masyarakat tersebut di atas.

1. Strategi Sosiopolitik

Strategi ini menurut Abdurrahman Wahid menekankan perlunya merinci butir-butir pokok dan formulasi ajaran Islam di dalam lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus menerusoleh gerakan-gerakan Islam, terutama melalui sebuah partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam atau sebuah partai politik eksklusif khusus umat Islam. Termasuk dalam strategi ini adalah tahap berikutnya, yaitu keharusan adanya kontrol terhadap aparatur pemerintah oleh kaum muslimin. Untuk mengantisipasi tercapainya tahap ini, umat Islam harus mendidik diri sendiri dengan moralitas Islam yang benar dan mengembangkan jalan hidup Islami, baik untuk individu maupun masyarakat. kampanye ke arah Islamisasi hukum nasional harus diberikan prioritas di dalam konteks ini.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 92-93.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 204.

Dengan demikian, strategi politik adalah salah satu strategi dari sekian banyak cara untuk melakukan dan mencapai sesuatu yang diperjuangkan. Pada aspek strategi politik, pandangan Abdurrahman Wahid terhadap nilai-nilai pendidikan Islam terjawab-tahkan pada sisi kemanusiaan yang harus memanusiakan manusia. Tentu bimbingan dan arahan menjadi tugas seluruh umat Islam dalam mencapai nilai-nilai kemanusiaan melalui sistem dan metode dalam pendidikan Islam.²¹

2. Strategi Kultural

Strategi ini dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan meluaskan cakrawala mereka, memperluas cakupan komitmen mereka, memperdalam kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia dan memperkuat solidaritas mereka dengan sesama manusia, tanpa memandang latar belakang ideologi politik, kesukaan, dan kultural mereka maupun agama. Cara mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan sepenuhnya mengembangkan sikap rasional kaum muslimin terhadap kehidupan. Strategi ini menekankan dialog terbuka dengan semua ideologi dan pemikiran filsafat sehingga kaum muslimin sebanyak mungkin bisa menyerap segala macam pengetahuan dan informasi. Tentu saja sikap ini menjauhkan diri dari segala bentuk pelembagaan ajaran Islam sepanjang hal ini akan menggiring mereka ke arah pandangan eksklusif dan pengekanan kebebasan berpikir dan menyetakan pendapat, suatu kebebasan yang dinilai tinggi oleh strategi ini.

²¹ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 130.

Strategi ini, selain itu, lebih suka pada ide sebuah negara sekuler selama bentuk pemerintahan ini cukup objektif untuk menjamin kebebasan.²²

Pada strategi kultural, konsep inklusifitas dalam pandangan Abdurrahman Wahid, artinya pendidikan Islam jangan kemudian terjebak pada literatur universal yang dimiliki. Akan tetapi, harus membuka cakrawala pemikiran kita untuk melihat perkembangan dunia dan mengakses berbagai macam ideologi dunia, sebagai bentuk pengetahuan dan informasi supaya mampu bersaing secara kompetitif dengan dunia luar. Tentu saja, hal tersebut di atas dirancang sebagai pengembangan kepribadian orang-orang muslim yang ideal.²³

Kerangka pendekatan kultural tidak hanya berpatokan pada tradisi semata, tetapi menjadi sebuah acuan dalam mengembangkan khazanah pemikiran yang terlahir dari adat istiadat tersebut. Kaitannya dengan pendidikan Islam, bahwasannya unsur-unsur Islami harus menjadi tradisi yang senantiasa terpatri terhadap peserta didik juga mampu menjadi kebiasaan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

3. Strategi Sosiokultural

Strategi ini melihat perlunya mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang mempergunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, kelembagaan yang lahir dari proses ini bukanlah institusi-institusi Islam yang

²² Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 204-205.

²³ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 130-131.

²⁴ *Ibid.*, h. 133.

eksklusif, melainkan “institusi biasa” yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, kerangka kemasyarakatan yang dikembangkan oleh kaum muslimin mesti serupa dengan apa yang dikembangkan oleh orang lain. Kebiasaan ini harus mencerminkan keinginan masyarakat untuk melakukan sendiri transformasi yang fundamental. Formalisasi ajaran Islam bukanlah bagian dari transformasi itu, melainkan membantu kemapanan masyarakat dimana kaum muslimin bisa melaksanakannya, baik secara individual maupun kemasyarakatan.²⁵

Pendekatan sosiokultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau yang terakhir ini terjadi maka, yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (eskapisme), ketika umat Islam menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. Lalu tidak diakui kemusliman orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat itu.²⁶

Selain itu, kenyataan bahwa gerakan-gerakan Islam Indonesia yang beragam dari segi strategi yang dipergunakannya untuk melayani tujuan Islam di tengah perubahan sosial saat ini, perlu dikaji apa pengaruhnya terhadap pesantren, terutama dalam upaya merumuskan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang kini dilakukan.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 205.

²⁶ *Ibid.*, h. 206.

Pendekatan sosiokultural dalam pendidikan Islam sangatlah penting adanya, mengingat keberagaman masyarakat yang semakin kuat. Dalam hal ini, bukan hanya sekedar keberagaman ada aspek suku, budaya, dan keyakinan, melainkan lebih dari itu. Hal yang paling esensi adalah keberagaman dalam corak pemikiran untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menjadi harapan dan keinginan serta cita-cita ideal bangsa ini mampu menjawab lewat jalur pendidikan Islam.²⁷

Oleh karena itu, dalam aspek sosiokultural, pendidikan Islam adalah suatu lembaga pendidikan yang harus mampu seimbang sehingga pendidikan Islam dalam eksistensinya mampu membina dan mengarahkan peserta didik untuk mengenal realitas dirinya dan lingkungan sekitarnya, dan pada satu sisi sebagai makhluk individual dan pada aspek yang lain sebagai manusia sosial yang harus diwujudkan ke dalam dunia nyata bermasyarakat.

²⁷ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 134.